

Ketentuan internasional terkait perdagangan ikan = International regulation on fisheries trade

Juliani Fransiska, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20440718&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang pengaturan permasalahan perdagangan ikan mulai dari proses penangkapan hingga berakhir ditangan konsumen berdasarkan ketentuan internasional. Permasalahan yang disorot dalam skripsi ini adalah maraknya tindak IUU Fishing dalam proses penangkapan, kerusakan ekosistem laut akibat tindak perikanan merusak dan pembuangan limbah ke laut, pemberian subsidi pemerintah dan kewajiban sertifikasi hasil perikanan dan produk perikanan. Skripsi ini menganalisis berbagai perjanjian internasional seperti UNCLOS, GATT, peraturan FAO, serta beberapa regulasi dan praktek negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan Indonesia dalam menangani permasalahan perdagangan ikan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil yang diperoleh adalah permasalahan dalam perdagangan ikan terus terjadi karena kurangnya political will dan perbedaan nilai pandang dari negara ? negara dalam menerapkan ketentuan internasional yang telah disepakati.

This thesis describes about problem issues on fisheries trade ranging from the catch process untill end in the hands of consumers based on international regulations. The problems which is highlighted in this research are the rampant acts of IUU Fishing, damage of marine ecosystems due to acts of destructive fishing and ocean dumping, providing government subsidies in fisheries and certification obligation of the fishery and fishery products. This thesis analyzes various of international regulation such as UNCLOS, GATT, FAO rules, regulation and pratices some countries such as USA, EU, Japan and Indonesia in addressing the problem of fisheries trade. The author uses a normative juridical research method. The result of this thesis shows that the problems in the fisheries trade still continues to occur because of lacking political will and differences in value of states? view in implementing the international regulation provisions.